BAB I

GAMBARAN UMUM PT. PLN (pesero)

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

1.1 Sejarah berdirinya PT. PLN (persero)

1.1.1 Riwayat Perusahaan

Menurut berbagai keterangan yang ditemukan menyatakan bahwa cahaya listrik mulai masuk di Indonesia sekitar akhir abad ke-19 yaitu pada Zaman Penjajahan Hindia Belanda. Pembangunan kelistrikan di wilayah Indonesia terjadi sebagai berikut :

1. Elektifikasi di wilayah kota Batavia, sekitar tahun 1893 merupakan Stads Besriff yang dikelola oleh pemerintah setempat dengan nama Electricteit Bedriff Batavia.
2. Elektrifikasi di wilayah kota Medan, sekitar tahun 1903 merupakan Stads Bedriff yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama Electricteit Bedriff Medan.
3. Elektrifikasi di wilayah kota Surabaya, sekitar tahun 1907 merupakan Stads Bedriff yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama Electristeit Bedriff Surabaya.

Pada tahun berikutnya dikatakan bahwa kelistrikan di bangun di kota-kota lainnya antara lain ; di Palembang dalam kaitannya dengan usaha pertambangan minyak, sedangkan di Ambon dan Makassar untuk kepentingan militer.

a. Perusahaan Listrik Zaman Hindia – Belanda

Setelah perusahaan listrik yang berpusat di Belanda didirikan di beberapa wilayah Indonesia (umumnya pembangkitan listrik), maka pendistribusian tenaga listrik oleh pemerintah daerah di alihkan kepada perusahaan listrik swasta. Menurut

pencatatan pendirian perusahaan listrik Belanda yang ada di Indonesia terjadi sebagai berikut :

1. Perusahaan listrik NV Nigm yang kemudian merubah menjadi NV OGEM
   a. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 28 tanggal 27 Juni 1913 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Batavia.
   b. Ijin beroperasi di keluarkan melalui SK. No. 29 tanggal 1 November 1915 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Messterconnelis (Jatinegara).
   c. Ijin beroperasi di keluarkan melalui SK. No. 14 tanggal 12 Mei 1924 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Tanggerang.
   d. Ijin beroperasi di keluarkan melalui SK. No. 6 tanggal bulan November 1924 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Cirebon.
   e. Ijin beroperasi di keluarkan melalui SK. No. 20 tanggal 25 November 1925 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Kebayoran Lama.
   f. Ijin beroperasi di keluarkan melalui SK. No. 12 tanggal 16 Juni 1927 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Cirebon luar kota.

   Pemberian ijin operasi pada NV untuk luar Jawa antara lain : dikeluarkan untuk wilayah kota Medan dan kemudian secara berturut-turut menyusul di wilayah Pelembang, Ujung Pandang, Tanjung Karang (Lampung), dan Manado. Keterangan mengenai ijin operasi kepada pendapat dan keterangan yang diperoleh, untuk wilayah Palembang terjadi sebelum tahin 1920 sedangkan untuk wilayah lainnya terjadi setelah tahun 1920, misalnya Medan, Lampung, Manado dan sebagainya.

2. Perusahaan Listrik NV ANEM

   a. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 6 tanggal 8 Februari 1914 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Surabaya, Semarang dan Yogyakarta.

   b. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 25 tanggal 9Mei 1927 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi beberapa wilayah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur diluar wilayah yang telah dikelola oleh OGEM, ELECTRICA, EMR dan EMB.

   c. Pemberian ijin beroperasi kepada NV ANEIM untuk elektricfikasi wilayah di luar Jawa antara lain Bukit Tinggi, Pontianak, Ambon dan sebagainya.

3. Perusahaan Listrik NV GEBEO

   Perusahaan listrik ini merupakan usaha bersama pemerintah Jawa Barat dengan keputusan yang diberikan sebagai berikut :

   a. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 24 tanggal 30 Januari 1923/1928 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Bandung dan sekitarnya

   b. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 24 Maret 1923/1928 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Bogor dan sekitarnya.

   c. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 24 bulan Desember 1930 ; No. 17 tanggal 21 Desember 1938; No. 21 tanggal 20 Mei 1940 dan No. 8 tanggal 18 Januari 1940 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Keresidenan dan Kabupaten seluruh Propinsi Jawa Barat, kecuali Cirebon dan Jakarta yang dikelola oleh NV NIGM

4. Perusahaan Listrik ELECTRA

   a. Ijin beroperasi kepada perusahaan listrik ELECTRA melalui SK. No. 37 tanggal 7 Juni 1915 untuk elektrifikasi wilayah kota Tulung Agung .

   b. Ijin beroperasi kepada perusahaan listrik ELECTRA melalui SK. No. 31 tanggal 4 September 1922 dan SK. No. 33 tanggal 30 Maret 1927 untuk elektrifikasi wilayah kota Tulung Agung .

5. Perusahaan Listrik SEM

   a. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 15 tanggal 21 desember 1925 untuk elektrifikasi wilayah kota Kesultanan Surakarta.

   b. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 8 tanggal 8 Januari 1937 untuk elektrifikasi wilayah Kabupaten dan sekitarnya yang termasuk wilayah Surakarta..

6. Perusahaan Listrik OJEM

   Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 28 tanggal 24 Februari 1925; No. 8 tanggal 26 Desember 1925; No. 61 dan 62 tanggal 29 Agustus 1927 dan No. 16 tanggal 8 Juni 1929 untuk elektrifikasi wilayah Keresidenan Panarukan dan beberapa dan sekitarnya

7. Perusahaan Listrik EMR

   a. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 12 tanggal 25 Juni 1927 untuk elektrifikasi wilayah kota palembang.

   b. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 8, 9, dan 10 tanggal 4 Maret 1929 untuk memperluas elektrifikasi wilayah Blora dan Bojonegoro.

8. Perusahaan Listrik EMB

   Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 31 tanggal 27 September 1939 untuk elektrifikasi wilayah Keresidenan Banyumas.

b. Perusahaan Listrik Zaman Jepang

Dalam Perang Dunia II semua perusahaan listrik dan wilayah Indonesia secara otomatis berada di bawah kekuasaan tentara Jepang. Perusahaan listrik yang berada di bawah kekuasaan sang pengawasan AD Jepang dijadikan perusahaan listrik Jepang dengan nama sebagai berikut :

1. Jawa Denki Jigyoko sha di kantor pusat di Jakarta
2. Sabu Jawa Denki sha di wilayah Jawa Barat
3. Chogu Jawa Denki sha di wilayah Jawa Tengah
4. Tobu Jawa Denki sha di wilayah Jawa Timur
5. Cabang-cabang lainnya tetap seperti semula

c. Perusahaan Listrik setelah Kemerdekaan Republik Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan Fisik sampai tiba saatnya kedaulatan RI diserahkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda kepada Indonesia. tahun 1957 merupakan titik tolak awal dari pengelolaan dan pengawasan kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Pemerintah RI, karena pada tahun tersebut dimulai adanya nasionalisme perusahaan asing di Indonesia.

Maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh pemerintah Indonesia yang dikukuhkan dengan peraturan No. 86 tahun 1958 Jo. PP No. 10 tahun 1959 tentang penetapaan dibentuknya perusahaan listrik dan gas milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan PP. No. 67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN_ sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN Bandung diganti dengan wilayah kerja di seluruh Jawa Barat, kecuali DKI Jaya dan Tanggerang

Berdasarkan PP. No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan recognisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan pemerintah, PLN Eksploitasi XI diubah menjadi PULN Distribusi Jawa Barat. Dengan adanya PP. No. 23 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk menjadi perusahaan perseroan dengan nama PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juni 1994 sesuai dengan akta pendirian.

1.1.2 Lambang atau Gambar PT. PLN

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang-lambang perusahaan, lambang mempunyai arti yang penting bagi suatu perusahaan dan merupakan tanda pengenal yang tetap, bahwa lambang itupun mampu mencerminkan keberadaan perusahaan.

PT. PLN mempunyai suatu lambang yang berbentuk petir atau yang telah lama dipakai oleh PLN beserta satuan-satuannya. Berikut ini merupakan keterangan lambang PT. PLN

a. Arti Lambang Perusahaan, Bentuk dasar Gambar dan Warna Lambang

Gambar atau lambang PT. PLN tercantum dalam satu bidang gambar datar.

1. Berwarna kuning keemasan
2. Berbentuk segi empat dan berskala ukuran lebar : panjang : 3 : 4
3. Tanpa garis pinggir, apabila diperlukan pengambilan segi empat tersebut dapat digunakan garis pinggir sebagai batas
4. Tanpa tulisan listrik negara atau tulisan apapun didalamnya

Gambar atau lambang PT. PLN terdiri dari :

1. Petir atau yang bentuknya tebal disebelah atas dan meruncing di sebelah bawah, berwarna merah dan memotong atau menembus ketiga garis gelombang
2. Tiga buah gelombang yang berbentuk sinusoda (2,5 periode) berwarna biru laut tersusun sejajar dalam arah mendatar terletak ditengah-tengah segi empat pada dasar kuning keemasan

b. Arti Lambang atau Gambar

Gambar diartikan sebagai berikut :

1. Petir atau kilat melambangkan yang terkandung didalamnya
2. Lambang dipergunakan dalam gambar, Karena segala macam tenaga (energi) dapat dinyatakan sebagai gelombang (cahaya listrik, akulstik dan lain-lain), kegiatan PT. PLN mencakup konversi segala macam tenaga (energi) menjadi tenaga listrik.
3. Tiga buah gelombang sejajar diartikan tiga sikap karyawan PT. PLN dalam melaksanakan tugas negara dengan bekerja keras, bekerja cepat dan bertindak tepat. Arti lainnya adalah pelayanan tugas PT. PLN harus serempak dalam tiga bidang: peningkataan, penyaluran, dan pendistribusian tenaga listrik.

Warna lambang PLN diartikan sebagai berikut :

1. *Warna kuning keemasan* melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, serta agungnya kewajiban PLN
2. *Warna merah darah* melambangkan keberanian dan dinamika dalam melaksankan tugas untuk mencapai sasaran pembangunan

3. *Warna biru laut* melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada tugas untuk menuju dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti dinyatakan dalam PP. No. 18 tahun 1927.

c. Penempatan tulisan yang menyatakan satuan PLN

Guna menyatakan satuan "PLN pada lambang PLN maka bila dianggap perlu, dapat ditempatkan tulisan" yang menyatakan satuan PLN" PLN yan bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada papan nama PLN dicantumkan sebelah kanan lambang tersebut
2. Pada benda seperti peralatan, kendaraan dan sebagainya disebelah atas lambang dicantumkan satuan induknya (PLN pusat, wilayah, proyek dan sebagainya) dibawah lambang dicantumkan satuan eselon berikutnya (PLN lambang, sektor dll).

d. Standar bentuk lambang PLN

Standar bentuk lambang PLN serta ukuran-ukurannya dilakukan seperti tertera pada gambar (terlampir). Semua lambang dibuat sesuai dengan kelipatan (1/10, 1/5,1/2, 1,2,3,……dst).

1.1.3 Visi, Misi, Motto, Filosofi, Tujuan dan Tatanilai Perusahaan PT. PLN

Visi, Misi, Motto

➢ Visi :

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

➢ Misi :

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada keputusan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.

b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

➢ Motto :

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik (Electricity for a Better Life)

1.1.4 Filosofi, Tujuan, dan Tatanilai Perusahaan

➢ **Filosofi :**

Filosifi atau Core Belieff adalah landasan utama sebagai keyakinan untuk menunjukkan Misi dan Visi perusahaan.

Landasan filosofi PLN Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah : "Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelanggan dengan menjadikan SDM sebagai Sumber Daya penting perusahaan"

➢ **Tujuan :**

Tujuan PT. PLN (persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dalam melakukan restrukturisasi ini adalah ***pertama*** untuk meningkatkan efisiensi dan ***kedua*** kepuasan pelanggan meningkat, dapat di uraikan untuk jangka pendek , menengah, dan jangka panjang sebagai berikut :

- Jangka pendek (2000-2001)
  a. Mempercepat pemilihan kesehatan keuangan perusahaan.
  b. Membentuk Unit-Unit Pelayanan Pelanggan (upp) sebanyak 76 unit migrasi dari ranting/rayon yang ada, dan sebagai pilot proyek diterapkan 2 unit yaitu : UPP Bandung Timur dan UPP Padalarang.

c. Membentuk Unit Pelayana Jaringan (UPJ) sebanyak 15 unit migrasi dari fungsi wire cabang (bagian distribusi dan bagian konstruksi).

d. Pilot proyek dalam mendirikan UPP dan UPJ yaitu cabang Bandung, Majalaya, dan Cimahi (BMC), koordinasi oleh tim BMC.

e. Menyiapkan 1 unit area Bandung Raya, Bale Endah, Cimahi, dan Sumedang.

f. Menyiapkan PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Barat menjadi UBD dengan organisasi yang baru, rekayasa ulang bisnis proses, mekanisme niaga serta persiapan SDM dan IT.

- Jangka menengah

a. Melaksanakan proses transformasi, organisasi melalui pembentukkan satu area yang membawahi UPJ-UPJ se Bandung Raya.

b. Menyiapkan UPP baru disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

c. Menyiapkan empat area lainnya, yaitu Bogor, Karawang/Bekasi., Cirebon dan Banten.

d. Memberdayakan SDM dan IT untuk rekayasa ulang bisnis proses, mekanisme meniaga, dan sistem managemen yang terpadu antara UPP, UPJ, Area dan UBD Jawa Barat.

- Jangka panjang (2000-2003)

a. Meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan yang siap menyongsong era kompetisi.

b. Melaksanakan proses transformasi orang melalui :

- Pembentukkan 5 area yang membawahi UPJ-UPJ
- Pembentukkan 15 Unit Pelayanan Jaringan
- Pembentukkan 84 Unit-unit Pelayanan Pelanggan

c. Memberdayakan SDM dan IT untuk rekayasa ulang bisnis proses, mekanisme niaga dan sisi managemen.

d. Menyiapkan pembentukkan Unit Non Core Business

e. Mentranformasikan UBD Jawa Barat dan Banten menjadi anak peusahaan (diperkirakan setelah tahun 2005).

➢ **Tata Nilai Perusahaan**

PT. PLN (persero) mewujudkan bersama dengan selalu menunjang dan menerapkan nilai-nilai :

- Saling percaya (mutual trust)
- Integritas (integrity)
- Peduli (care)
- Pembelajar (learner)

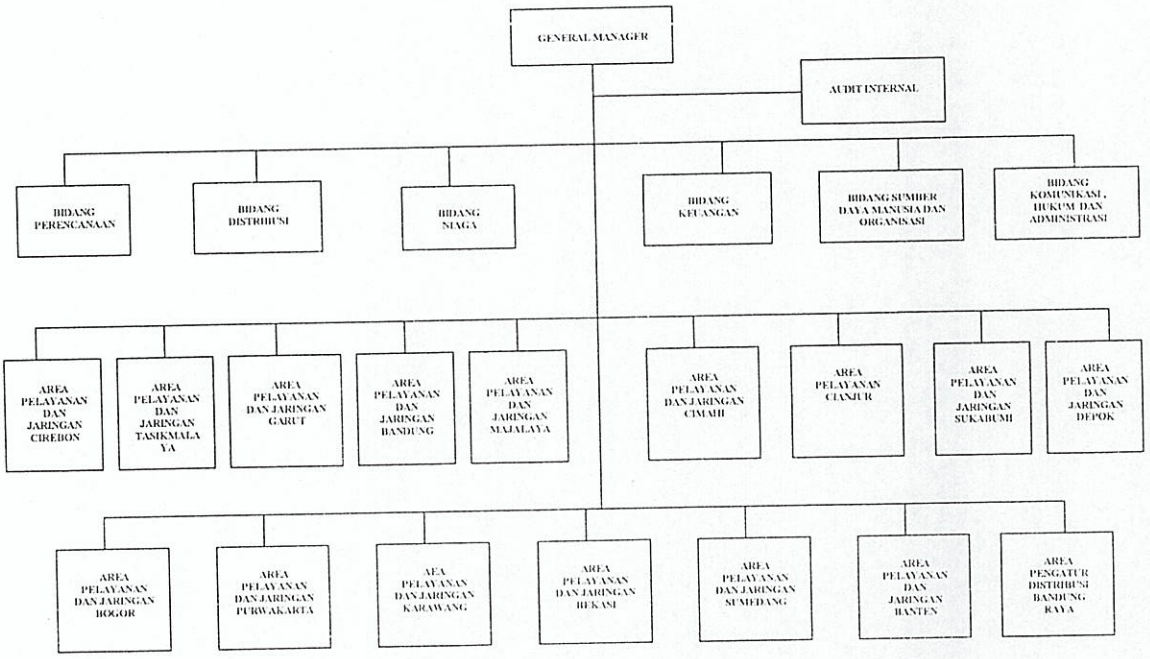
1.2 Struktur Perusahaan/Instansi

Dalam struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, Posisi Public Relations berada di bawah bidang Ilmu Komunikasi, Hukum dan administrasi. Akan tetapi Job Descriptionnya berbeda satu dengan yang lainnya.

BAGAN 1.1

SUSUNAN ORGANISASI

PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN



PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten di kepalai oleh seorang General Manager yang dibantu oleh Audit Internal. General Manager sendiri membawahi enam departemen diantaranya :

1. Bidang Perencanaan
2. Bidang Distribusi
3. Bidang Niaga
4. Bidang Keuangan

5. Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi

6. Bidang Komunikasi, Hukum, dan Administrasi

Selain itu juga General Manager mempunyai tugas untuk memantau beberapa Area pelayanan dan Jaringan di beberapa daerah/wilayah antara lain : Cirebon, TasikMalaya, Garut, Bandung, Majalaya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Depok, Bogor, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Sumedang, Banten, dan Bandung Raya.

1.3 Job Deskription

Uraian fungsi bidang-bidang dan Audit Internal pada kantor Distribusi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

1. Bidang Perencanaan

a. Menyusun Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RPJ), dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
b. Menyusun rencana pengembangan sistem ketenaga listrikan
c. Menyusun sistem manajemen kinerja unit-unit kerja;
d. Menyusun metoda evaluasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian finansialnya;
e. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan penyandang dana, baik secara bilateral maupun multilateral;
f. Menyusun rencana pengembangan sistem teknologi informasi;
g. Menyusun rencana pengembangan aplikasi sistem informasi;
h. Mengendalikan aplikasi-aplikasi teknologi informasi;
i. Menyiapkan SOP pengelolaan aplikasi sistem informasi;
j. Menyusun laporan manajemen;

k. Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta penetapan pengaturannya.

2. *Bidang Distribusi*

a. Menyusun rencana pengembangan sistem jaringan dan membina penerapannya;

b. Menyusun strategi pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi dan membina penerapannya;

c. Menyusun SOP untuk penerapan dan pengujian peralatan distribusi, serta SOP untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi;

d. Menyusun desain standar konstruksi jaringan distribusi dan peralatan kerjanya serta membina penerapannya;

e. Mengevaluasi susutnya energi listrik dan gangguan pada sarana pendistribusian tenaga listrik serta saran perbaikannya;

f. Menyusun metode kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta membina penerapannya;

g. Menyusun kebijakan managemen jaringan distribusi dan kebijakan managemen perbekalan distribusi serta membina penerapannya;

h. Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi jaringan distribusi;

i. Menyusun regulasi untuk penyempurnaan data induk jaringan (DIJ)

j. Memantau dan mengevaluasi data induk jaringan;

3. *Bidang Niaga*

a. Menyusun ketentuan dan strategi pemasaran;

b. Menyusun rencana penjualan energi dan rencana pendapatan;

c. Mengevaluasi harga jual listrik;

d. Menghitung biaya penyediaan tenaga listrik;

e. Menyusun strategi dan pengembangan pelayanan pelanggan;

f. Menyusun standar dan produk pelayanan;

g. Menyusun ketentuan data induk pelanggan (DIL) dan data induk saldo (DIS) serta kontrak jula beli tenaga listrik;

h. Mengkaji pengelolaan pencatatan meter dan menyusun rencana penyempurnaannya;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan kepada pelanggan tertentu, antara lain TNI, POLRI dan instansi vertical;

j. Melakukan pengendalian DIS dan opname saldo piutang;

k. Menyusun konsep kebijakan sistem informasi pelayanan pelanggan;

l. Menyusun mekanisme interaksi antar unit pelanggan;

m. Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta pengaturannya;

n. Menyusun laporan manajemen dibidangnya.

4. *Bidang Keuangan*

a. Mengendalikan aliran kas pendapatan dan membuat laporan rekonsiliasi keuangan;

b. Mengendalikan anggaran investasi dan operasi serta rencana aliran kas pembiayaan;

c. Melakukan analisis dan evaluasi laporan unit-unit serta menyusun laporan keuangan konsolidasi;

d. Menyusun dan menganalisa kebijakan resiko dan penghapusan asset;

e. Melakukan pengelolaan keuangan;

f. Menyusun laporan manajemen dibidangnya

5. *Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi*

   a. Menyusun kebijakan pengembangan organisasi dan mengelola pelaksanaannya;

   b. Menyusun kebijakan manajemen sumberdaya manusia dan mengelola pelaksanaannya;

   c. Menyusun kebijakan pengembangan sumberdaya manusia dan mengelola pelaksanaannya;

   d. Mengkaji usulan pengembangan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia;

   e. Menyusun laporan manajen dibidangnya.

6. Bidang Komunikasi, Hukum dan Administrasi

   a. Menyusun kebijakan dan mengelola komunikasi kemasyarakatan dan pelanggan baik internal maupun eksternal;

   b. Menyusun kebijakan dan mengelola fasilitas kerja, sistem pengamanan dan manajemen kantor;

   c. Menyusun kebijakan K3, lingkungan dan community development;

   d. Menyusun kebijakan administrasi;

   e. Menyusun dan mengkaji produk-produk hukum dan peraturan-peraturan perusahaan;

   f. Memberikan advokasi dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan;

   g. Menyusun standar fasilitas kantor;

   h. Mengelola asset tanah dan bangunan serta sarana kerja;

   i. Mengelola kesekretariatan dan rumah tangga kantor induk;

   j. Menyusun laporan manajemen dibidangnya.

7. *Audit Internal*

   a. Menyusun program kerja pemeriksaan tahunan, sesuai program kerja perusahaan;

   b. Melaksanakan audit internal, meliputi keuangan, teknik, manajemen dan sumber daya manusia;

   c. Memberikan masukkan dan rekomendasi yang menyangkut proses manajemen dan operasional;

   d. Memonitor tindak lanjut temuan hasil audit internal;

   e. Menyusun laporan manajemen dibidangnya.

Adapun Tugas Pokok Unit Organisasi Area di lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut :

1. Area Pelayanan Jaringan

   Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat laporan atas pencapaian pendapatan penjualan tenaga listrik, pelayanan pelanggan, pengoparasian, pemeliharaan jaringan distribusi di daerah kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mencapai kinerja unit.

2. Area Pengatur Distribusi

   Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta laporan atas kegiatan operasi pengaturan jaringan distribusi di daerah kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mencapai kinerja unit.

1.4 Sarana dan Prasarana

Beberapa fasilitas yang dimiliki oleh PT. PLN sebagai alat penunjang dalam aktivitas dan kegiatan-kegiatan lain adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Sarana dan Prasarana Bagian Public Relations

No	Rincian Fasilitas Kerja	Jumlah
	PERALATAN FOTOGRAFI	
1	Kamera Nikon	2 buah
2	Kamera Pocket Nikon	1 buah
3	Kamera Digital	2 buah
4	Lensa Zoom	2 buah
5	Tripod Kamera	1 buah
	PERALATAN REKAMAN	
6	Tape Recorder	2 buah
7	Alat Rekam Digital	1 buah
	PERALATAN AUDIO VISUAL	
8	Televisi 29'	1 buiah
9	VCD	1 buah
10	DVD	1 buah
11	Handycam	2 buah
12	Peralatan Audio	1 buah
	PERALATAN KOMPUTER	
13	Komputer	9 Center
14	Printer	5 unit

1.5 Lokasi dan Waktu PKL

Lokasi pelaksanaan kerja praktek lapangan yaitu di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, Jl. Cikapundung Barat No. 2 Bandung.

Lamanya pelaksanaan kerja praktek lapangan 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 22 Juli sampai 22 Agustus 2003, dari setiap hari Senin – Jum'at pukul 07.00 s.d 15.00).